

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Literasi Keuangan**

###### **2.1.1.1 Definisi Literasi Keuangan**

Literasi keuangan sudah seharusnya diterapkan secara lebih luas guna membentuk masyarakat yang memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan keuangan, peningkatan literasi keuangan ini diharapkan mampu memberikan nilai produktivitas yang lebih tinggi lagi dikalangan masyarakat (Soetiono, 2018). Literasi keuangan dapat menggambarkan bahwa seseorang memiliki kemampuan ataupun kapasitas diri dalam pengambilan keputusan keuangan.

Menurut Desiyanti (2020, 5) definisi literasi keuangan adalah sebagai berikut:

“Literasi Keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan individu dalam mengendalikan keuangan pribadi dan bisnis. Literasi keuangan juga adalah elemen penting untuk individu ataupun kelompok guna menghindari permasalahan keuangan”

Otoritas Jasa Keuangan (2020, 14), menyatakan pengertian literasi keuangan adalah sebagai berikut:

“Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan ataupun keyakinan individu yang akan mempengaruhi perilaku individu dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan dan pengelolaan keuangan guna mencapai kesejahteraan.”

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan dan keterampilan individu dalam mengelompokkan keuangan bisnis dan pribadi yang berguna untuk pengambilan keputusan keuangan dan pengelolaan keuangan agar terhindar dari permasalahan-permasalahan keuangan di masa depan.

### **2.1.1.2 Tingkat Literasi Keuangan**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2013) dalam buku Destiyani (2020, 5), tingkat literasi penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Well Literate*, yaitu masyarakat memiliki pengetahuan dan keyakinan akan lembaga jasa keuangan formal, termasuk didalamnya menggunakan produk dari jasa keuangan, memanfaatkan fitur dari jasa keuangan serta memanfaatkan dan paham akan resiko dari jasa keuangan. Masyarakat juga dapat memenuhi hak dan kewajibannya akan produk jasa keuangan formal, juga terampil dalam menggunakan produk ataupun jasa keuangan formal.
2. *Sufficient Literate*, pada bagian ini masyarakat mempunyai pengetahuan dan keyakinan akan lembaga jasa keuangan formal serta menggunakan produk dan jasa keuangan, fitur jasa keuangan, manfaat dan risiko keuangan formal, hak dan kewajiban akan produk ataupun jasa keuangan.
3. *Less Literate*, pada bagian ini masyarakat hanya mempunyai pengetahuan lembaga keuangan baik jasa maupun produk keuangan.

4. *Not Literate*, pada bagian ini masyarakat sama sekali tidak memiliki pengetahuan ataupun keyakinan akan lembaga jasa keuangan formal, juga tidak memiliki keyakinan akan produk ataupun jasa dari lembaga jasa keuangan formal, dan tidak mempunyai keterampilan akan menggunakan produk ataupun jasa dari keuangan formal.

### **2.1.1.3 Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan**

Tujuan literasi keuangan menurut Soetiono (2018, 24) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan individu yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam menggunakan produk dan jasa layanan keuangan.
2. Memberikan pemahaman bagaimana mengelola keuangan dengan baik, bagaimana menyusun anggaran pribadi dan memahami pentingnya menabung.
3. Literasi keuangan membuat masyarakat memahami tentang produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

Manfaat literasi keuangan menurut Soetiono (2018, 25) adalah sebagai berikut:

1. Bagi Individu  
Tingkat literasi keuangan yang baik, dapat membuat individu memiliki pemahaman tentang manfaat, risiko dan biaya atas produk dan layanan jasa keuangan yang dimilikinya serta hak dan kewajiban sebagai konsumen sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
2. Bagi Lembaga Keuangan  
Kenaikan tingkat pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan masyarakat sebaiknya dapat memotivasi industri keuangan untuk terus berinovasi mengembangkan dan menciptakan produk dan layanan keuangan yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

### 3. Bagi Negara

Kenaikan tingkat literasi keuangan diharapkan mampu juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.

#### **2.1.1.4 Indikator Pengukuran Literasi Keuangan**

Indikator pengukuran yang digunakan untuk mengukur literasi keuangan pelaku UMKM ini merujuk pada penelitian Puspitasari dan Astrini (2021). Berdasarkan penelitian tersebut literasi keuangan diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, antara lain:

##### 1. Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)

Pengetahuan keuangan ini berkaitan dengan pengetahuan pelaku usaha mengenai lembaga keuangan formal, pengetahuan terhadap produk dan layanan formal, dan juga pengetahuan terhadap karakteristik produk.

##### 2. Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Perilaku keuangan ini bertujuan untuk melihat bagaimana perilaku pelaku usaha melakukan upaya seperti menabung, berinvestasi ataupun melakukan pinjaman dan aktivitas lainnya dengan tujuan mencapai tujuan keuangan.

##### 3. Sikap Keuangan (*Financial Attitudes*)

Sikap keuangan ini berhubungan dengan bagaimana gaya hidup pelaku usaha dalam menggunakan uangnya. Sikap keuangan ini meliputi apakah pelaku usaha memiliki tujuan keuangan jangka pendek seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk mempertahankan hidup.

## **2.1.2 Inklusi Keuangan**

### **2.1.2.1 Definisi Inklusi Keuangan**

Menurut Wardhono (2018, 7) definisi inklusi keuangan adalah sebagai berikut:

“Inklusi keuangan dapat diartikan pemberian jasa keuangan yang tepat pada tiap individu dan memberikan pemahaman dan akses terhadap jasa keuangan formal”

Soetiono (2018, 9) menyatakan pengertian inklusi keuangan sebagai berikut:

“Inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang diberikan pemerintah dengan tujuan meniadakan segala bentuk hambatan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau”

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan merupakan tersedianya akses jasa dan layanan keuangan yang tepat serta mudah untuk dijangkau masyarakat, sehingga mengurangi hambatan yang ada di masyarakat.

### **2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Inklusi Keuangan**

Tujuan inklusi keuangan menurut Desiyanti (2020, 9) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PJUK).

2. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PJUK yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
3. Meningkatkan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Manfaat inklusi keuangan menurut Soetiono (2018, 34) adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah masyarakat dalam menggunakan produk layanan keuangan formal seperti akses tabungan ataupun akses permodalan.
2. Membantu bank untuk lebih memberikan fokus pada deposito ritel dan deposito kecil. Inklusi juga dapat meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan.
3. Inklusi keuangan yang lebih luas di perbankan secara signifikan dapat meningkatkan ketahanan dana sektor perbankan dan stabilitas keuangan secara keseluruhan.

### **2.1.2.3 Pengukuran Inklusi Keuangan**

Menurut Soetiono (2018, 112) inklusi keuangan dapat diukur melalui beberapa indikator seperti:

#### **1. Indikator Akses**

Indikator akses ini dapat menjelaskan sejauh apa pelaku usaha dalam menggunakan layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, seperti kantor cabang bank dan ATM.

#### **2. Indikator Penggunaan**

Indikator penggunaan dapat mengukur bagaimana pelaku usaha menggunakan jasa keuangan, seperti keteraturan dan durasi dari penggunaan produk atau jasa keuangan.

### 3. Indikator Kualitas

Indikator ini dapat mengukur apakah produk dan jasa keuangan formal yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

## 2.1.3 Pengelolaan Keuangan

### 2.1.3.1 Definisi Pengelolaan Keuangan

Menurut Astuty (2019, 1) definisi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan artinya mengedepankan bagaimana individu mengelola pemasukan dana dan mengelola pengeluaran dana nya secara bijak dalam berbagai kegiatan. Pengelolaan keuangan ini harus dilakukan oleh perusahaan, wirausaha maupun perorangan, dana yang dimiliki perlu diketahui struktur kekayaan, struktur finansial, serta struktur permodalannya”

Dumillah (2021, 1) menyatakan pengertian pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan disebut juga seni dan ilmu mengelola uang, pengelolaan keuangan juga artinya pengadaan dana untuk pemanfaatan usaha di waktu yang tepat”

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan memiliki pengertian sebagai seni maupun ilmu mengelola uang yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi agar bisa memaksimalkan pemasukan dan pengeluaran keuangan usaha nya semaksimal mungkin.

### **2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Keuangan**

Menurut Dumillah (2021, 4) pengelolaan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Planning, pengelolaan keuangan digunakan sebagai perencanaan arus kas dan rugi laba.
2. Budgeting, berguna sebagai pengalokasian anggaran biaya secara efisien untuk memaksimalkan dana yang dimiliki.
3. Controlling, pengelolaan keuangan sebagai pengendalian sehingga dapat dilakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan yang dimiliki.
4. Auditing, pengelolaan keuangan berguna untuk melakukan audit internal atas keuangan usaha yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
5. Reporting, melalui pengelolaan keuangan dapat dilakukannya pelaporan informasi atas kondisi keuangan usaha dan analisa rasio laporan keuangan.

Menurut Kariyoto (2018, 6) pengelolaan keuangan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memaksimalkan nilai perusahaan.
2. Menjaga stabilitas keuangan agar dalam situasi yang selalu terkontrol.
3. Mengurangi resiko perusahaan di masa kini dan di masa yang akan datang.

### **2.1.3.3 Indikator Pengukuran Pengelolaan Keuangan**

Menurut Rumbianingrum (2018) Indikator untuk pengelolaan keuangan dapat diukur dengan 4 (empat) indikator, antara lain:

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan

tersebut. Perencanaan keuangan ini berkaitan dengan perencanaan anggaran biaya usaha nya.

## 2. Pencatatan

Pencatatan ini berkaitan dengan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan nya secara sistematis dan kronologis. Pencatatan ini diawali dari pengumpulan dokumen yang mendukung terjadinya transaksi. Seperti nota, kwitansi, faktur, dll. Selanjutnya menulis transaksi ke dalam jurnal, lalu di posting ke dalam buku besar. Jenis-jenis catatan ini adalah jurnal, buku besar, worksheet.

## 3. Pelaporan

Pelaporan ini adalah langkah lanjutan dari pencatatan sebelumnya. Postingan dalam buku besar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir periode yang biasanya dilakukan pada akhir bulan, setelah itu dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ada Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan.

## 4. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan apabila diperlukan. Jenis-jenis pengendalian adalah pengendalian awal, pengendalian berjalan, dan pengendalian umpan balik.

### **2.1.4 Kinerja Pelaku UMKM**

#### **2.1.4.1 Definisi UMKM**

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 UMKM didefinisikan sebagai usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu. Sedangkan menurut Abdurohim (2021, 2) UMKM adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau dimiliki oleh sekelompok orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

#### 2.1.4.2 Kriteria UMKM

Menurut Undang No.20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM. UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria UMKM**

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	> Rp 50 juta-Rp 500 juta	>300 juta-Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	> Rp500 juta-Rp10 miliar	> Rp 2,5 miliar-Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20 Tahun 2008

#### 2.1.4.1 Klasifikasi UMKM

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, dalam buku Abdurrahim (2021, 9), UMKM dapat diklasifikasikan berdasarkan perspektif perkembangannya menjadi empat kelompok, yaitu :

1. *Livelihood activities*, adalah UMKM dengan kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Di Indonesia kategori ini adalah yang terbesar.
2. *Micro Enterprise*, adalah UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, UMKM ini sering memiliki jiwa *entrepreneurship*. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari UMKM kategori ini. Bila dikelola dengan baik, maka para pelaku UMKM ini bisa masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UMKM kategori ini jauh lebih kecil dibanding dari UMKM kategori satu dan dua. Kelompok UMKM ini sudah bisa menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*, adalah UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar (melakukan transformasi menjadi usaha besar), kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UMKM kategori satu dan dua.

#### **2.1.4.2 Definisi Kinerja Pelaku UMKM**

Menurut Abdurrohman (2021, 72) definisi kinerja pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

“Kinerja Pelaku UMKM adalah hasil kerja yang dicapai oleh pelaku usaha baik secara kelompok maupun perorangan dan merupakan penentu dalam suatu proses untuk mencapai tujuan usaha”

Purba (2021, 36) menyatakan pengertian kinerja pelaku UMKM sebagai berikut:

“Kinerja pelaku UMKM merupakan hasil kerja yang dicapai pelaku usaha secara keseluruhan dibandingkan dengan target, sasaran, kriteria yang telah ditentukan dengan kriteria aset dan omzet yang telah ditentukan dalam undang-undang”

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaku UMKM adalah hasil kerja yang dicapai oleh pelaku usaha setelah melakukan banyak upaya untuk usahanya agar mencapai tujuannya.

#### **2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat Kinerja Pelaku UMKM**

Menurut Murfat (2021, 40) kinerja pelaku UMKM ini memiliki tujuan seperti berikut:

1. Mengelola pelaku usaha untuk kompetensi pelaku usaha
2. Mengelola diversitas pelaku usaha untuk meraih keunggulan bersaing
3. Mengelola pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing
4. Mengelola pelaku usaha untuk menghadapi globalisasi ataupun go internasional

Menurut Fauzi (2020, 13) kinerja pelaku UMKM memiliki manfaat seperti berikut:

1. Pelaku usaha dapat bekerja lebih efektif sesuai dengan tujuan-tujuan usaha
2. Peningkatan tanggung jawab, semangat, dan produktivitas para pelaku usaha

#### **2.1.4.4 Permasalahan Menurut Konsultan dan Pendamping UMKM**

Menurut Abdurrohman (2021, 85) problematika yang dihadapi UMKM berdasarkan konsultan dan pendamping UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas sumber daya manusia UMKM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan para pelaku usaha.
- b. Banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Sebagian UMKM kurang memiliki pengetahuan akan aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusannya.
- c. Kurangnya inovasi produk. UMKM dinilai masih belum menguasai teknologi, manajemen, informasi, dan pasar.

- d. UMKM juga masih mengalami banyak kendala dalam hal mengakses modal dan pendanaan dari layanan keuangan formal.
- e. Kurangnya tenaga pendamping di lapangan.

#### **2.1.4.5 Pengukuran Kinerja Pelaku UMKM**

Indikator untuk mengukur kinerja pelaku UMKM pada penelitian ini merujuk pada penelitian Sanistasya (2019). Menurut Sanistasya (2019) diukur dengan tiga indikator, antara lain:

##### **1. Produktivitas**

Produktivitas ini menggambarkan kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan produk dan adanya peningkatan penjualan produk dari waktu ke waktu. Produktivitas ini dilihat berdasarkan kenaikan penjualan dari satu periode dibandingkan periode sebelumnya, jika tingkat penjualan meningkat maka perolehan laba juga meningkat.

##### **2. Profitabilitas**

Profitabilitas ini dapat dilihat dari selisih antara penerimaan usaha dikurangi biaya-biaya dalam satu periode. Pendapatan usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan operasional (pendapatan utama yang berasal dari hasil penjualan produk atau jasa) dan pendapatan non operasional, yaitu pendapatan yang didapatkan dari selain pendapatan utama seperti pendapatan hasil penjualan usaha berharga, penjualan aktiva tak berwujud, bunga, sewa dan royalti.

##### **3. Pasar**

Indikator pasar ini dapat menggambarkan bagaimana pelaku usaha dapat meningkatkan pasar usaha. Pertumbuhan pasar dapat meningkat apabila terjadi peningkatan jumlah permintaan dari pasar selain itu pasar yang dijangkau juga semakin luas.

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan literasi keuangan, inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan serta kinerja pelaku UMKM.

**Tabel 2.2**

**Tabel Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Puspitasari dan Astrini (2021).	Dampak Literasi Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Pelaku UMKM.	Literasi Keuangan memiliki pengaruh terhadap Kinerja UMKM. Inklusi Keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja UMKM. Literasi keuangan dan Inklusi keuangan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM.
2	Sanistasya, Rahardjo dan Iqbal (2019)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur.	Terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat pengaruh positif dan signifikan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Provinsi Kalimantan Timur.
3	Kusumadewi (2017)	Pengaruh Locus Of Control dan Financial Literacy Terhadap Kinerja UKM pada Pelaku UKM Desa Rawa Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.	Locus Of Control berpengaruh positif terhadap kinerja UKM Desa Rawa. Sedangkan Financial Literacy tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja UKM.
4	Wira Iko Putri Yanti (2019)	Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di	Inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Literasi keuangan berpengaruh positif

No	Peneliti	Judul	Hasil
		Kecamatan Moyo Utara.	dan signifikan terhadap kinerja UMKM.
5	Fajri, Indriasih dan Indriyanti (2021)	Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Batik di Kabupaten Tegal.	Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMKM Batik di Kabupaten Tegal.
6	Rumbianingrum dan Wijayangka (2018)	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM.	Literasi keuangan berpengaruh positif pada pengelolaan keuangan UMKM.
7	Suindari dan Juniariani (2020)	Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja Usaha (UMKM).	Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Kompetensi Sumber Daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, dan Strategi Pemasaran berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.
8	Hertadiani dan Lestari (2021)	Pengaruh Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Sektor Kuliner di Jakarta Timur.	Inklusi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM. Pengelolaan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja UMKM Sektor Kuliner di Jakarta Timur.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Positif Literasi Keuangan terhadap Kinerja Pelaku UMKM**

Literasi keuangan merupakan pengetahuan tentang bagaimana cara seorang individu dalam mengelola dan mengendalikan keuangannya. Literasi keuangan secara luas juga dapat diartikan sebagai pengetahuan individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangannya. Menurut Soetiono (2018) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga jasa serta produk jasa keuangan diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku keuangan masyarakat sehingga dapat tercapainya kesejahteraan *financial*. Pelaku UMKM dengan tingkat literasi yang cenderung rendah, merasa sulit untuk membuat keputusan mengenai sumber pembiayaan serta seringkali merasa tidak siap menghadapi permintaan *dua diligence* dari potensi pembiayaan atau menegosiasikan persyaratan dari pembiayaan.

Sanistasya (2019) menerangkan literasi keuangan membantu usaha kecil dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pelaku usaha untuk menyusun strategi keuangan dan membuat keputusan dan pilihan yang baik dalam memilih layanan keuangan. Literasi keuangan juga memfasilitasi usaha kecil untuk memperbanyak usahanya dan meningkatkan profitabilitas, produktivitas dan keunggulan kompetitif di Kalimantan Timur. Septiani (2020) juga mengatakan dalam penelitiannya bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, hal ini didukung dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di wilayah Sidoarjo sudah memiliki pemahaman yang

berkaitan dengan transaksi ekonomi dan jenis-jenis praktiknya sehingga berdampak positif pada pertumbuhan dan kelangsungan UMKM di wilayah Sidoarjo.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sanistasya (2019) dan Septiani (2020) dengan hasil penelitiannya sama-sama menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan dapat meningkatkan kinerja pelaku UMKM.

**Hipotesis 1: Literasi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pelaku UMKM**

### **2.2.2 Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Pelaku UMKM**

Inklusi keuangan adalah seluruh upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau. OJK tahun 2017 menyatakan bahwa kepemilikan UMKM terhadap produk-produk keuangan masih relatif rendah. UMKM ketika mengalami kesulitan keuangan dalam usahanya biasanya cenderung meminjam kepada keluarga dan kerabat, lalu ada yang lebih memilih memotong pengeluaran usahanya dan hanya sebagian kecil dari UMKM yang meminjam ke layanan keuangan formal. Maka dari itu kinerja UMKM ini dapat dipengaruhi oleh bagaimana pelaku usaha mendapatkan bantuan dana dari lembaga keuangan. Inklusi keuangan yang baik dapat memberikan kekuatan UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Yanti (2019) inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, karena inklusi keuangan memberi bantuan terhadap pelaku UMKM dalam peningkatan kinerja keuangan yang berdampak pada pengembangan dan pertumbuhan usahanya. Menurut Fajri (2021) inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pelaku UMKM karena inklusi keuangan ini berperan penting dalam peningkatan dan pengembangan usahanya, selain itu inklusi keuangan adalah salah satu aspek yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM untuk penambahan modal.

**H2 : Inklusi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pelaku  
UMKM**

### **2.2.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pelaku UMKM**

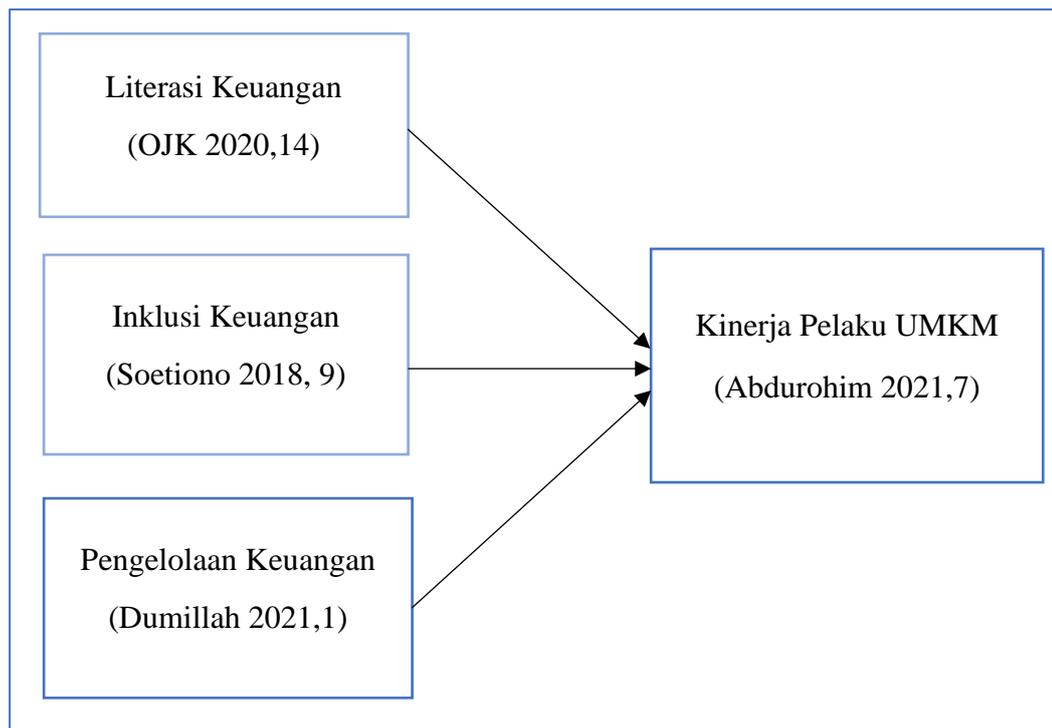
Pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas usaha yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, pengeluaran dan pengelolaan aktiva lainnya dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan keuangan suatu perusahaan. Seluruh aktivitas ini berkaitan dengan meminimalkan biaya, penggunaan dana dan pengalokasian dana seefisien mungkin agar dapat memaksimalkan keuntungan untuk suatu usaha. Secara umum, hanya sedikit pelaku UMKM yang menyadari pentingnya pengelolaan keuangan usahanya. Menurut Fatwitawati (2018) pengelolaan keuangan menjadi aspek penting untuk suatu perusahaan dan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi ini digunakan untuk memproses secara sistematis seluruh kegiatan transaksi perusahaannya, sehingga akuntansi ini menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Maka dari itu menurut Fatwitawati selama UMKM masih menggunakan uang untuk usahanya, selama itu juga akuntansi dibutuhkan untuk UMKM dalam mengelola keuangannya usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suindari (2020) menunjukkan hasil bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Menurutnya profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dapat membantu pelaku usaha dalam mencapai tujuan keuangan usaha, karena mengelola usaha perlu didampingi oleh pengelolaan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan kinerja yang baik pula. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hertadiani dan Lestari (2021) juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja

dan keberlanjutan UMKM, menurutnya pelaku UMKM yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan dengan baik mampu membuat rencana dan menjadikan rencana usahanya dapat diwujudkan.

### **H3: Pengelolaan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pelaku UMKM**

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2021, 99) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini telah terlebih dahulu dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Literasi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pelaku UMKM

H2 : Inklusi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pelaku UMKM

H3 : Pengelolaan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pelaku  
UMKM